

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA



**Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat akademik
Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

OLEH :

**BAMBANG FERYANTO SUTJAHO
NIM 201220251001**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2014**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

JUDUL TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA

OLEH :
BAMBANG FERYANTO SUTJAHJO
NIM 201220251001

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUJUI PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 2014

Pembimbing I

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Pembimbing II

Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

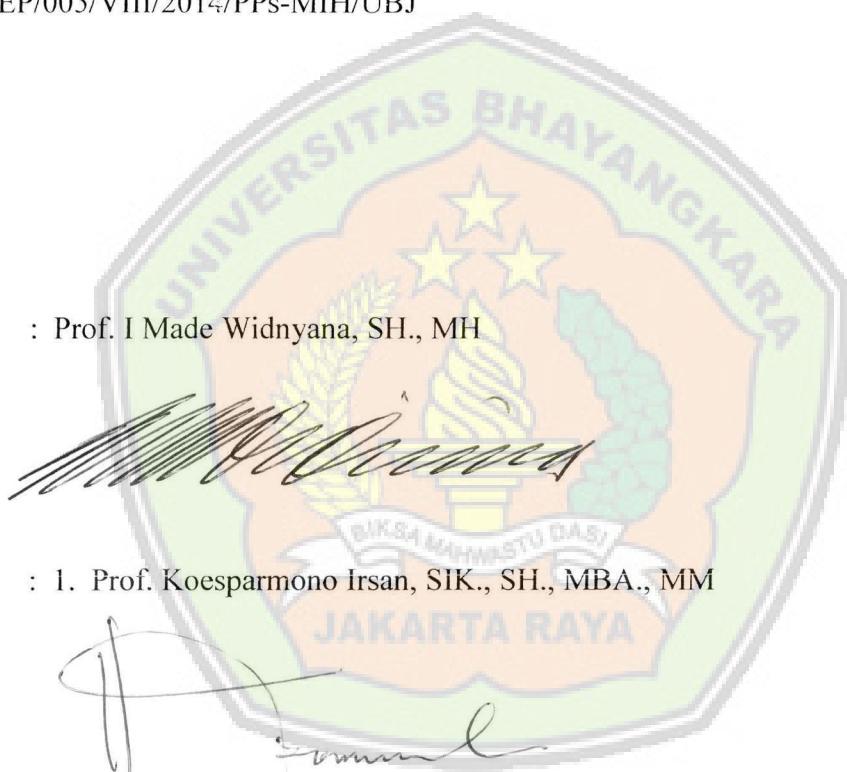
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anton Wachidin Widjaja

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 28 Agustus 2014

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/005/VIII/2014/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH



Anggota : 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

2. Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Boy Nurdin", is placed over a horizontal line.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak.-XI/M/XII/2013

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : BAMBANG FERYANTO SUTJAHJO
NIM : 201220251001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA



Prof. I Made Widnyana, SH., MH Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

W.W. Womack

Prof. I Made Widnyana, SH., MH



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140

Telepon : 021-7231948-7267655 Fax. : 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya - Bekasi Utara Telp. 021-88655882

Website : <http://www.ubharajaya.ac.id> Email : PPs@ubharajaya.ac.id

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : BAMBANG FERYANTO SUTJAHJO

NIM : 201220251001

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 28 Agustus 2014



(BAMBANG FERYANTO SUTJAHJO)
Nama Jelas

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

Cogito Ergo Sum...Aku Berpikir Maka Aku Ada

-Rene Descartes (Bapak Filsafat Modern)



Kupersembahkan karya ini Untuk orang tuaku terkasih,

Mertuaku terkasih serta istri

dan anak-anaku tersayang

KATA PENGANTAR

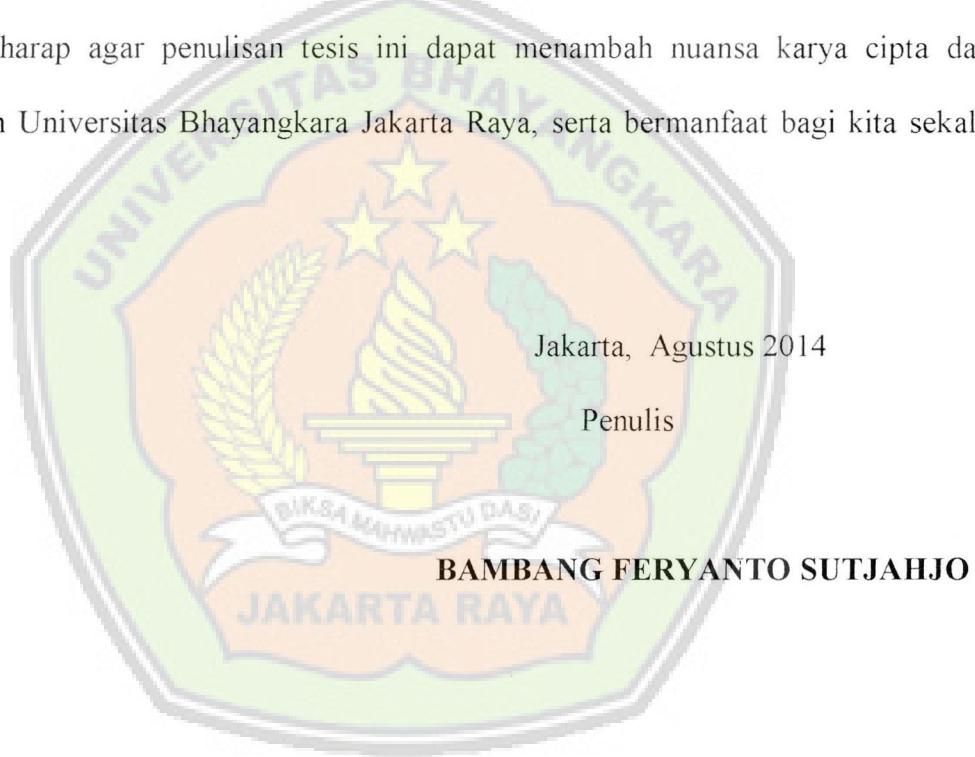
Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah menganugrahi segala nikmat, yaitu nikmat kesehatan, pikiran, dan tenaga sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa rahmat Allah Yang Maha Penyayang tidak dapat menyelesaikan tepat pada waktunya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, SH, MM, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Prof. I Made Widnyana, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan sebagai Pembimbing I, Bapak Prof. Koesparmono Irsan, S.Ik, SH, MBA, MM, selaku Pembimbing II, yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliaudengan penuh kesabaran.
3. Kepada Bapak Dosen dan Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membimbing dan mendidik penulis, selama menjadi Mahasiswa.
4. Ucapan terima kasih penulis kepada istr an anak-anak yang menjadi pendorong utama dalam memberikan semangat demi terwujudnya tesis ini Sungguh berat rasanya bagi penulis untuk membalas semua kebaikan dan jasa yang sangat berharga yang kami peroleh. Semoga Allah Yang Maha Pengasih membalas amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Penulis menyadari, bahwa selesainya penyusunan tesis ini

adalah berkat dorongan serta doa dari keluarga dan rekan-rekan. Mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis baik dalam mengolah data maupun dalam cara penyajian ataupun penguasaan bahasa penulisan, masih banyak kekurangan dan kelemahannya.

Oleh karena itu, kami memohon maaf kepada yang terhormat Dewan Pengaji atas segala kekurangan dan kelemahan itu. Segala saran serta petunjuk berupa apapun yang menuju ke arah penyempurnaannya akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap agar penulisan tesis ini dapat menambah nuansa karya cipta dalam kepustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta bermanfaat bagi kita sekalian. Amiiin.



ABSTRAK

Penelitian dengan judul “ Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*” dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk 1. mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang 2. memberikan kontribusi sumbangannya pemikiran kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan *illegal logging* dan penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Formulasi Tindak Pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang.- Tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan *illegal logging* tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan *illegal logging* sendiri-sendiri. - Subyek hukum *illegal logging* menurut UU No. 18 Tahun 2013 adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancaman sanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging*. Belum terakomodasi dalam undang-undang ini oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak diatur secara tegas dalam undangundang tersebut untuk lolos dari tuntutan hukum. - Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana bersifat kumulatif, pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. - Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi dengan aturan khusus. Kebijakan aplikasi formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksi dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. 2. Kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* yang akan datang diharapkan memuat secara jelas dan lengkap mengenai 1. Definisi *Illegal Logging* 2. Subyek Hukum tindak pidana *Illegal Logging* (pribadi dan badan hukum atau badan usaha atau korporasi dan pegawai negeri dirumuskan dalam pasal-pasal yang komprehensif 3. Sanksi Pidana, hendaknya dirumuskan tidak secara kaku *kumulatif*, namun lebih fleksibel dengan perumusan *alternatif* atau *kumulatif-alternatif*.

Kata kunci : Penegakan hukum, *Illegal Logging*

ABSTRACT

The study titled "Criminal Justice Policy in Crime Tackling Illegal Logging" normative juridical approach with case studies, it is intended for the 1st determine and analyze policy formulation illegal logging activities and the application of current sanctions contribute 2 donation thought to the legislature in formulating legislation, especially in the problem of illegal logging and sanction criminal acts in the future. The results showed that: 1 Formulation Crime of illegal logging and the application of sanctions applicable sekarang.- Offence forestry regulated and formulated in article 50 and article 78 of Law 41 of 1999, but the definition of what is meant by illegal logging is not formulated limitedly so many legal practitioners interpret their own illegal logging. - The subject of illegal logging law, according to Law No. 18 of 2013 is a good one in terms of personal, corporation or business entity, arranged in the same chapter of the article does not distinguish individual or corporation so that the corporation liable to the same penalties private. Of officials who have authority in the field of forestry, which could increase the intensity of illegal logging. Have not been accommodated in this law, therefore, it becomes a legal loophole that can be exploited by actors who are not expressly regulated in the law is to escape from prosecution. - The threat of criminal sanction imposed is criminal is cumulative, the main criminal in prison and fines, an additional form of punishment and confiscation of proceeds of crime or the tools to do the crime, compensation and disciplinary sanctions. - Criminal fines for corporations has not been equipped with special rules. Application policy formulation illegal logging activities and the application does not meet the perceived sanction certainty and fairness aspects. 2. policy formulation illegal logging activities is expected impending contains a clear and complete for 2 1 Definition of Illegal Logging Law Subjects criminal offense of Illegal Logging (personal and legal entity or business entity or corporation and civil servants formulated within the articles are 3 comprehensive Criminal Sanctions, should not be rigidly defined cumulative, but more flexible with the formulation of alternative or cumulative-alternative.

Keywords: Law enforcement, Illegal Logging

DAFTAR ISI

	hlm
COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
B. Tindak Pidana Dalam Bidang Kehutanan.....	34
C. Tindak Pidana Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	43
D. Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dan Perbuatan Turut Serta (<i>Deelneming</i>) & Perbuatan Berlanjut (<i>Vorgezette Handeling</i>) Dalam Hukum Pidana.....	48
BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i>.....	59
A. Kebijakan Hukum Pidana.....	59
B. <i>Illegal Logging</i>	62
C. Undang-Undang di Bidang Kehutanan yang Terkait dengan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	65

D.	Ketentuan Pidana di Luar Bidang Kehutanan yang Terkait dengan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	71
E.	Penerapan Kebijakan Formulasi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dan Sanksi Pidana yang Berlaku Sekarang.....	81
BAB IV	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING.....	91
A.	Sebab, Akibat, dan Faktor yang Mendorong Terjadinya <i>Illegal Logging</i>	91
B.	Penanggulangan <i>Illegal Logging</i>	104
C.	Aspek Kebijakan Kriminalisasi atau Formulasi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	111
D.	Aspek Pertanggungjawaban Pidana atau Kesalahan Pidana.....	116
E.	Aspek Pemidanaan.....	121
BAB V	PENUTUP.....	126
A.	Kesimpulan.....	126
B.	Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN